

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh

Dilla Artika Yelfi¹, Dwirani Puspa Arhta²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia.

*Korespondensi: dilaartika2404203@gmail.com, dwiranipuspa@fe.unp.ac.id

Info Artikel

Diterima:

28 Juli 2025

Disetujui:

10 Agustus 2025

Terbit daring:

15 Agustus 2025

DOI: -

Sitasi:

Yelfi, D.A & Arhta, D.P (2025). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh

Abstract:

This study aims to analyze the effect of social assistance expenditure, Gross Regional Domestic Product (GRDP), health measured by Life Expectancy (LE), and unemployment measured by the Open Unemployment Rate (OUR) on poverty levels in Aceh Province during the 2014–2023 period. Poverty levels were measured using the percentage of the poor population as the main indicator. The method employed was panel data regression analysis. The results indicate that social assistance expenditure has a positive but insignificant effect on poverty. GRDP and health have a negative and significant effect, indicating that improvements in GRDP and life expectancy can significantly reduce poverty levels. Meanwhile, unemployment has a positive but insignificant effect on poverty. These findings highlight that the health sector has the most effective role in reducing poverty compared to other variables.

Keywords: poverty, social assistance expenditure, GRDP, health, unemployment

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh yang diukur menggunakan persentase penduduk miskin sebagai indikator utama. Selain belanja bantuan sosial, penelitian ini juga mengkaji pengaruh pdrb, kesehatan (diukur melalui angka harapan hidup/AHH), dan pengangguran (diukur dari tingkat pengangguran terbuka/TPT) terhadap kemiskinan selama periode 2014 hingga 2023. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Variabel Pdrb dan kesehatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang menunjukkan bahwa peningkatan indikator kesehatan dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara nyata dan peningkatan pdrb juga bisa menurunkan kemiskinan. Sementara itu, pengangguran memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa sektor kesehatan memiliki peran paling efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dibandingkan variabel lainnya.

Kata Kunci: kemiskinan, belanja bantuan sosial, PDRB, kesehatan, pengangguran,

Kode Klasifikasi JEL:

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan kondisi ketika individu atau kelompok tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Fenomena ini menjadi salah satu tantangan utama bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Wulandari & Aisyah, 2021). Penurunan tingkat kemiskinan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi hambatan besar bagi pembangunan sosial dan ekonomi, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah namun belum mampu mengelolanya secara optimal. Pulau Sumatera, sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sejatinya memiliki peluang besar untuk berkembang. Namun, fakta menunjukkan bahwa beberapa provinsi di Sumatera masih memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Salah satu provinsi yang menonjol dalam hal ini adalah Aceh, yang meskipun memiliki kekayaan alam dan sejarah penerimaan dana otonomi khusus, tetap menghadapi tantangan kompleks dalam mengurangi kemiskinan. Kondisi ini menuntut strategi pengelolaan sumber daya dan

kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran agar potensi daerah dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Tingkat Kemiskinan tabel 1.1

Provinsi	2014	2024
Aceh	18,05	14,23
Sumatera Utara	9,38	7,99
Sumatera Barat	6,89	5,97
Riau	7,99	6,67
Jambi	8,39	7,1
Sumatera Selatan	13,62	10,97
Bengkulu	17,09	13,56
Lampung	14,21	10,69
Kep. Bangka Belitung	4,97	4,55
KePulauan Riau	5,37	5,37
Indonesia	10,96	8,57

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Data pada table 1.1 memperlihatkan tingkat kemiskinan Pada tahun 2014, Aceh mencatat persentase kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera sebesar 18,05%, sementara Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat kemiskinan terendah yaitu 4,97%. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan menurun di hampir seluruh provinsi; Kepulauan Bangka Belitung tetap menjadi daerah dengan angka kemiskinan terendah (4,55%), sedangkan Aceh masih menempati posisi tertinggi meskipun mengalami penurunan menjadi 14,23%. Kondisi tingginya kemiskinan di Aceh berpotensi memicu peningkatan angka kriminalitas (Nisa et al., 2024) serta menghambat laju pertumbuhan ekonomi (Maulana et al., 2022), yang mengindikasikan bahwa tantangan dalam mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut masih cukup besar. Menindaklanjuti kondisi tersebut, terdapat berbagai faktor yang turut berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan di suatu daerah. Salah satu faktor utamanya adalah bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan, khususnya pada sektor-sektor penting seperti pendidikan, PDRB, dan layanan kesehatan. Di samping itu, tingginya tingkat pengangguran juga menjadi persoalan yang harus segera ditangani, karena penurunan pengangguran merupakan langkah yang sangat penting dalam menekan angka kemiskinan secara efektif (Mardiana et al., 2018). Belanja daerah merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan fiskal, yaitu upaya pemerintah untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan instrumen anggaran, terutama melalui belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial ini meliputi pengeluaran untuk program-program yang langsung menysasar masyarakat miskin dan rentan, seperti bantuan tunai, subsidi pangan, serta dukungan layanan dasar. Semakin besar dan tepat sasaran alokasi belanja bantuan sosial, semakin besar pula potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan. Namun demikian, besarnya anggaran yang dialokasikan tidak otomatis menjamin dampak positif jika belanja bantuan sosial tidak disalurkan secara efektif, tepat sasaran, dan inklusif. Jika hal ini tidak terpenuhi, belanja daerah justru dapat gagal memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan.

Penelitian oleh Maharani et al. (2024) dan Hartanto et al. (2023) mengungkapkan bahwa belanja daerah terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Namun, efektivitas belanja tersebut sangat bergantung pada arah dan kualitas pengalokasiannya. Jika belanja hanya terfokus pada aspek administratif

tanpa langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin, dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan cenderung minim. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa daerah dengan belanja sosial yang besar belum tentu mengalami penurunan kemiskinan yang signifikan, yang menandakan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan lebih bergantung pada sejauh mana belanja tersebut disalurkan secara tepat sasaran dan inklusif

Tidak hanya belanja daerah yang memengaruhi tingkat kemiskinan, namun terdapat pula sejumlah faktor lain yang turut berperan dalam menentukan kesejahteraan masyarakat, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pengangguran. Ketiga variabel ini merupakan aspek penting yang dapat dijadikan variabel kontrol dalam analisis, guna menjaga akurasi hasil estimasi serta menghindari bias dalam melihat hubungan antara belanja daerah dan kemiskinan. Infrastruktur, yang dapat diukur dari jumlah fasilitas umum atau panjang jalan, berperan dalam membuka akses ekonomi dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Di sisi lain, sektor kesehatan—misalnya melalui indikator Angka Harapan Hidup—berkaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat dan produktivitas tenaga kerja. Sementara itu, pengangguran menunjukkan seberapa besar masyarakat usia kerja yang belum terserap dalam pasar kerja. Menurut Mardiana et al. (2018), tingginya tingkat pengangguran dapat memperburuk kondisi kemiskinan karena keterbatasan penghasilan dan rendahnya daya beli masyarakat. Maka dari itu, analisis yang komprehensif terhadap kemiskinan memerlukan pendekatan multidimensional yang mempertimbangkan berbagai faktor penentu kesejahteraan secara langsung maupun tidak langsung.

Di samping belanja bantuan sosial, faktor-faktor lain seperti pdrb, kesehatan, dan pengangguran juga memainkan peran krusial dalam memengaruhi tingkat kemiskinan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran utama yang menunjukkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah selama periode tertentu. PDRB menjadi indikator penting untuk menilai seberapa aktif perekonomian dan perkembangan pembangunan di daerah tersebut. Daerah dengan PDRB tinggi biasanya memiliki aktivitas ekonomi yang lebih maju dan potensi yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dari sisi kesehatan, angka harapan hidup mencerminkan kondisi kesehatan penduduk secara umum, di mana semakin tinggi angka tersebut menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik dan produktivitas yang lebih tinggi. Sementara itu, pengangguran yang diukur melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan proporsi angkatan kerja yang belum terserap dalam lapangan pekerjaan. TPT yang tinggi menandakan keterbatasan kesempatan kerja yang berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat. Dengan demikian, ketiga indikator ini—panjang jalan, angka harapan hidup, dan TPT—berkontribusi signifikan terhadap pencapaian pembangunan yang merata dan pengurangan kemiskinan di suatu daerah.

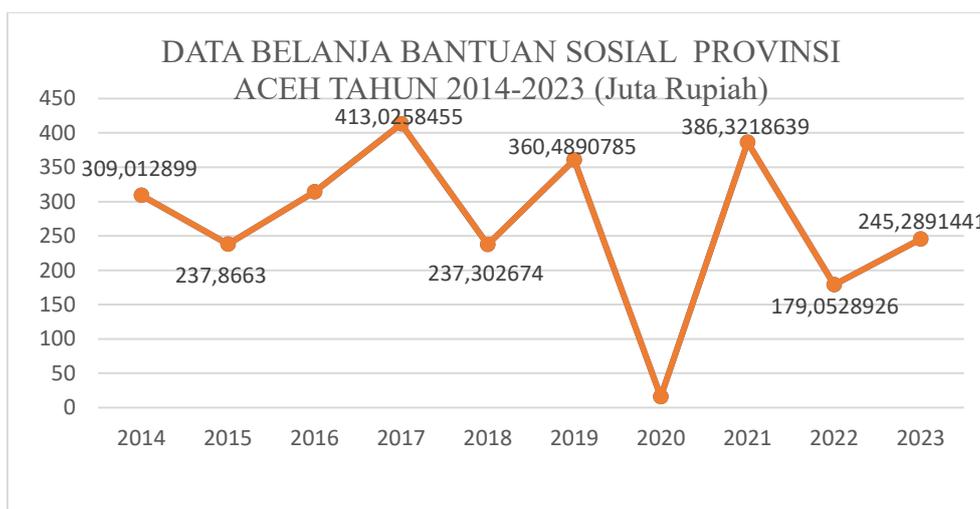
Dalam mengukur hubungan antara belanja bantuan sosial dan tingkat kemiskinan, pemilihan metode analisis memiliki peran yang sangat penting. Karena data yang digunakan melibatkan beberapa provinsi dalam kurun waktu 2014-2023, maka pendekatan yang tepat adalah dengan menggunakan metode regresi data panel. Metode ini mampu menggabungkan data cross-section (antarwilayah) dan time series (antarwaktu), sehingga memberikan hasil estimasi yang lebih akurat dan informatif. Regresi data panel juga memungkinkan untuk mengontrol heterogenitas individu atau wilayah, serta mampu mengidentifikasi dinamika perubahan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, metode ini dinilai lebih sesuai dalam menjelaskan pengaruh belanja daerah terhadap kemiskinan secara menyeluruh dan mendalam.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh serta untuk mengetahui sejauh mana belanja bantuan sosial mampu berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memahami dinamika kemiskinan di Provinsi Aceh, serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan

kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut teori Keynesian, belanja pemerintah, termasuk belanja bantuan sosial, merupakan instrumen fiskal yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pengeluaran yang diarahkan ke sektor-sektor produktif seperti pdrb, pendidikan, dan kesehatan diyakini dapat meningkatkan permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, semakin besar belanja bantuan sosial yang dialokasikan secara efektif, maka semakin besar pula peluang untuk menekan angka kemiskinan.

Grafik 1.2 Belanja Bantuan Sosial



Namun, realita di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah tidak selalu diiringi dengan penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data bantuan sosial Provinsi Aceh tahun 2014–2023 yang ditampilkan pada Gambar 1.1, belanja daerah Aceh mengalami fluktuasi signifikan. Belanja bantuan sosial pada tahun 2014 mencapai sekitar 305 miliar rupiah, kemudian menurun menjadi sekitar 238 miliar pada 2015, dan naik tajam pada 2017 ke angka sekitar 413 miliar rupiah. Setelah itu, terjadi penurunan kembali pada 2018, lalu meningkat lagi pada 2019 mencapai sekitar 360 miliar rupiah. Pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis, tetapi kembali naik signifikan pada 2021 hingga hampir mencapai 386 miliar rupiah, dan kemudian menurun lagi di tahun-tahun berikutnya. Meski belanja bantuan sosial mengalami peningkatan pada beberapa tahun tertentu, angka kemiskinan di Aceh pada tahun 2024 tetap tinggi, yakni sebesar 14,23%—masih tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, seperti yang terlihat pada data kemiskinan provinsi tahun 2014 dan 2024. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Putri et al. (2021) yang menyatakan bahwa belanja daerah memiliki hubungan positif terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota, tetapi tidak signifikan secara statistik. Artinya, peningkatan anggaran belanja daerah belum tentu berdampak nyata dalam menurunkan kemiskinan apabila pengelolaannya tidak efektif atau tidak difokuskan pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin. Oleh karena itu, efektivitas penggunaan belanja daerah menjadi faktor kunci dalam mengimplementasikan teori Keynesian di tingkat pemerintahan daerah untuk mengatasi kemiskinan secara optimal.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan data sekunder dan data kuantitatif, khususnya data panel provinsi-provinsi di Pulau Sumatera periode 2014–2023. Sumber data ini di peroleh dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Variabel yang diteliti dalam studi ini pengaruh belanja bantuan sosial terhadap kemiskinan

denagn variable control pdrb, Kesehatan (AHH) dan pengangguran (TPT). Studi ini menggunakan model regresi data panel dengan menggunakan STATA 14.

Model regresi data panel digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dengan mempertimbangkan dimensi waktu dan perbedaan antar wilayah. Dalam konteks penelitian ini, tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen dianalisis terhadap beberapa faktor seperti belanja daerah, infrastruktur, kesehatan, dan pengangguran di Provinsi Aceh selama periode tertentu. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggabungkan data runtut waktu dan data lintas daerah, serta dapat mengontrol perbedaan karakteristik masing-masing wilayah. Model ini juga memungkinkan peneliti memilih antara pendekatan efek tetap (fixed effect) atau efek acak (random effect), berdasarkan hasil uji kesesuaian seperti uji Hausman

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + \mu_{it}$$

Diketahui : variabel dependen yaitu kemiskinan (μ_{it}), variabel Independen adalah Belanja Bantuan Sosial (X1), Pdrb (X2), Kesehatan (X3), dan Pengangguran (X4). $\beta_1 - \beta_4$ merupakan parameter regresi yang di estimasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penerapan regresi data panel dalam analisis pengaruh belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2014–2023, model ini dibangun berdasarkan data panel kabupaten/kota yang mencakup beberapa variabel independen yang dianggap relevan dalam menjelaskan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemodelan regresi ini menggunakan variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen, sedangkan variabel-variabel independen yang digunakan meliputi belanja bantuan sosial, Pdrb, angka harapan hidup sebagai representasi sektor kesehatan, serta tingkat pengangguran terbuka.. Model persamaan yang diperoleh dari regresi data panel sebagai berikut:

Hasil persamaan estimasi regresi data panel

Variabel	Coef.	Std. Err	P> t
Belanja bantuan sosial (x1)	.0953839	.0602962	0.115
Pdrb (x2)	-.0369827	.0143691	0.011
Kesehatan (x3)	-1.798018	.217807	0.000
Pengangguran (x4)	.0323139	.0299753	0.282
Cons	137.3506	14.6443	0.000

Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen, yaitu belanja daerah, secara statistik berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang terjadi di provinsi aceh. Model regresi yang digunakan merupakan model data panel, dengan mempertimbangkan karakteristik lintas waktu dan antar daerah (cross-section dan time series). Dalam pengujian ini jika ditetapkan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,01 atau 1%. Artinya, jika nilai probabilitas (p-value) yang dihasilkan dari model regresi lebih kecil dari 0,01, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap kemiskinan.

Adapun dengan hipotesis yang ditetapkan adalah:

Jika $H_0: \beta_1 = 0$, variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

Jika $H_1: \beta_1 \neq 0$, variabel independen memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Belanja bantuan sosial (X_1), Nilai probabilitas sebesar $0,115 > 0,01$. Hal ini menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Dengan demikian, hipotesis H_0 diterima, yang berarti bahwa belanja daerah tidak memiliki hubungan yang signifikan dalam menurunkan atau menaikkan angka kemiskinan secara statistik.
2. Nilai probabilitas sebesar $-0,0369827$, yang lebih besar dari tingkat signifikansi $0,01$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PDRB per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa peningkatan PDRB per kapita tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dapat diterima. Kesimpulannya, peningkatan PDRB per kapita belum memberikan dampak nyata secara statistik dalam menurunkan tingkat kemiskinan.
3. Kesehatan (X_3), Nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,01$. Ini menunjukkan bahwa kesehatan, yang diukur dengan angka harapan hidup, berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Maka, hipotesis H_1 diterima, yang berarti peningkatan kualitas kesehatan secara nyata dapat menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah observasi.
4. Pengangguran (X_4), Nilai probabilitas sebesar $0,230 > 0,01$. Artinya, variabel pengangguran tidak memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap kemiskinan. Dengan demikian, hipotesis H_0 diterima, yang menunjukkan bahwa fluktuasi tingkat pengangguran dalam data ini belum cukup menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan secara signifikan.

Uji Hausman

Berdasarkan hasil uji Hausman dalam penelitian ini, diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,000$ yang lebih kecil dari tingkat signifikansi $0,01$. Hal ini menunjukkan bahwa model Fixed Effect lebih tepat digunakan dibandingkan Random Effect, karena terdapat korelasi signifikan antara efek individual dan variabel independen. Dengan demikian, model Fixed Effect dinilai layak dan relevan untuk menjelaskan pengaruh belanja daerah dan variabel kontrol terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

Arah hubungan pengaruh masing-masing variabel terhadap kemiskinan di provinsi aceh

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa belanja bantuan sosial memiliki efek positif terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh dengan koefisien $0,0954$, namun pengaruh ini tidak signifikan secara statistik karena nilai p sebesar $0,115$ lebih besar dari $0,05$. Hal ini menandakan bahwa peningkatan belanja bantuan sosial belum berhasil secara nyata dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Di sisi lain, variabel PDRB per kapita menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien $-0,03698$ dan nilai p sebesar $0,011$, yang berarti bahwa pertumbuhan PDRB per kapita secara signifikan membantu menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, sektor kesehatan juga memiliki pengaruh negatif yang sangat signifikan terhadap kemiskinan, dengan koefisien $-1,798$ dan nilai p $0,000$. Variabel pengangguran meskipun menunjukkan pengaruh positif terhadap kemiskinan dengan koefisien $0,0323$, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik karena nilai p sebesar $0,282$. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sektor kesehatan merupakan faktor penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh.

Variabel PDRB per kapita menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Aceh, ditunjukkan oleh nilai t -hitung sebesar $-2,57$ (lebih kecil dari t -tabel $-1,9744$) dan p -value $0,011$ ($< 0,05$), sehingga hipotesis diterima. Secara teoritis, peningkatan PDRB per kapita mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan daya beli dan akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dasar, yang pada akhirnya membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan juga mendukung pengembangan sektor-sektor produktif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan (Todaro & Smith, 2012).

Kemudian, variabel kesehatan yang diukur melalui angka harapan hidup menunjukkan hasil yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh selama periode 2014–2023. Semakin tinggi angka harapan hidup, maka tingkat kemiskinan cenderung menurun, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai t -hitung $-13,70 < -t$ -tabel $-1,9744$ dan p -value $0,000 < 0,05$. Secara teoritis, kesehatan merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia yang penting dalam meningkatkan produktivitas, karena individu yang sehat mampu bekerja, belajar, dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi secara maksimal, sedangkan kondisi kesehatan yang buruk dapat menurunkan pendapatan dan memperbesar risiko kemiskinan (Folland, Goodman & Stano, 1997).

Variabel pengangguran menunjukkan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh selama periode 2014–2023, dengan koefisien $0,0364$, t -hitung $1,20 < t$ -tabel $1,9744$, dan p -value $0,230 > 0,05$. Artinya, meskipun peningkatan pengangguran cenderung diikuti oleh kenaikan tingkat kemiskinan, hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Secara teoritis, pengangguran berkaitan erat dengan kemiskinan karena rendahnya penyerapan tenaga kerja mengakibatkan berkurangnya pendapatan masyarakat, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan, sebagaimana dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2015) bahwa pengangguran merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan di negara berkembang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect, ditemukan bahwa variabel independen dan variabel kontrol secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh, yang dibuktikan dengan nilai probabilitas uji F sebesar $0,000 (< 0,05)$. Secara parsial, variabel PDRB per kapita dan sektor kesehatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dengan koefisien masing-masing $-0,03698$ ($p = 0,011$) dan $-1,798$ ($p = 0,000$). Sebaliknya, variabel belanja bantuan sosial dan pengangguran menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan kesehatan sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh, sementara efektivitas belanja bantuan sosial dan pengelolaan pengangguran perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan sebaiknya lebih difokuskan pada peningkatan PDRB per kapita dan sektor kesehatan untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (15 Juli 2021). *Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk di Provinsi Aceh Maret 2021*. Diakses dari BPS Aceh. <https://aceh.bps.go.id/id/pressrelease/2021/07/15/640/profil-kemiskinan-dan-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-di-provinsi-aceh-maret-2021.html>
- Fahraini, A. R., Andiny, P., & Safuridar, S. (2024). *Dampak belanja pemerintah sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh*. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 2536–2545. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i5.4650>
- Folland, S., Goodman, A. C., & Stano, M. (1997). *The economics of health and health care* (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

- Idris, M. P. A., Zahro, G. F., Nugraheni, N., & Kurniawan, A. (2024). *Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (2008–2019)*. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Riset (SNHR)*.
- Mardiana, M., Militina, T., & Utary, A. R. (2018). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur terhadap tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur (2006–2015). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 50–60.
- Melati, A. M., Sudradjat, & Burhany, D. I. (2021). *Pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja bantuan sosial terhadap kemiskinan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat*. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 422–430.
- Putri, R. A., Zamzami, Z., & Rahmadi, S. (2021). *Pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi*. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 10(2), 107–122. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i2.12858>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic development* (11th ed.). Pearson Addison-Wesley.
- Wulandari, H. & Aisyah, S. (2021). Analisis determinan kemiskinan di Provinsi Jawa dan Bali. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(2), 106–116. <https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=skmGJdsAAAAJ>